

**ANALISIS DETERMINAN DAN IMPLIKASI TINGKAT PENYERAPAN
ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA**

TESIS

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Magister Pada
Program Magister Akuntansi**



EEN BEANA PRATIWI

122000716

PROGRAM PASCASARJANA

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI

YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA

YOGYAKARTA

2022

LEMBAR PERSETUJUAN PENGUJI



Program Magister Akuntansi dan Magister Manajemen
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta

UJIAN TESIS

Tesis berjudul:

ANALISIS DETERMINAN DAN IMPLIKASI TINGKAT PENYERAPAN ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA

Telah diuji pada tanggal: 13 September 2022

Tim Penguji:

Ketua

Prof. Dr. Baldrick Siregar, M.B.A., C.M.A., Ak., CA.

Anggota

Dr. Rusmawan Wahyu Anggoro, M.S.A., Ak., CA.

Pembimbing

Dr. Bambang Suropto, M.Si., C.M.A., Ak., CA.

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS DETERMINAN DAN IMPLIKASI TINGKAT PENYERAPAN ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA

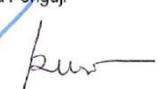
dipersiapkan dan disusun oleh:

Een Beana Pratiwi

Nomor Mahasiswa: 122000716

telah dipresentasikan di depan Tim Penguji pada tanggal: 13 September 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Akuntansi (M.Ak.) di bidang Akuntansi

SUSUNAN TIM PENGUJI

Pembimbing  Dr. Bambang Suropto, M.Si., C.M.A., Ak., CA.		Ketua Penguji  Prof. Dr. Baldric Siregar, M.B.A., C.M.A., Ak., CA. Anggota Penguji  Dr. Rusmawan Wahyu Anggoro, M.S.A., Ak., CA.
--	---	--

Yogyakarta, 13 September 2022
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN
Ketua,


Dr. Wisnu Prajogo, MBA.

LEMBAR KEASLIAN KARYA TULIS



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA YOGYAKARTA
JL. SETURAN, YOGYAKARTA 55281, P.O. BOX 1014 YOGYAKARTA 55010
TELP. (0274) 486160, 486321, FAKS. (0274) 486155 www.stieykpn.ac.id

Pernyataan Keaslian Karya Tulis Tesis

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa tesis dengan judul:

ANALISIS DETERMINAN DAN IMPLIKASI TINGKAT PENYERAPAN ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA

diajukan untuk diuji pada tanggal 13 September 2022, adalah hasil karya saya.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam tesis ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian karya tulis orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan orang lain. Bila dikemudian hari terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, maka saya bersedia menerima pembatalan gelar dan ijazah yang diberikan oleh Program Pascasarjana STIE YKPN Yogyakarta batal saya terima.

Saksi 1, sebagai Ketua Tim Penguji

Prof. Dr. Baldrick Siregar, M.B.A., C.M.A., Ak., CA.

Saksi 2, sebagai Anggota Penguji

Dr. Rasmawan Wahyu Anggoro, M.S.A., Ak., CA.

Yogyakarta, 13 September 2022

Yang memberi pernyataan

Een Beana Pratiwi

Saksi 3, sebagai Pembimbing

Dr. Bambang Suropto, M.Si., C.M.A., Ak., CA.

Saksi 4, sebagai Ketua STIE YKPN Yogyakarta

Dr. Wisnu Prajogo, MBA.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh bukti empiris terkait dengan faktor-faktor yang memengaruhi Penyerapan Anggaran serta imbasnya terhadap kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Variabel yang diduga kuat mempengaruhi Penyerapan Anggaran yaitu faktor kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) dan kelancaran pengadaan barang dan jasa. Untuk mengukur variabel kualitas SDM digunakan indikator yaitu persentase PNS dengan kualifikasi minimal strata satu (S1), sedangkan untuk mengukur variabel kelancaran pengadaan barang dan jasa digunakan indikator persentase jumlah tender yang dapat diselesaikan. Selanjutnya terkait masalah keterlambatan penyerapan anggaran ini nantinya akan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat maupun pertumbuhan ekonomi. Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel kesejahteraan masyarakat yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sedangkan indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu seluruh pemerintah daerah pada tingkat kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2021. Hasil penelitian ini menunjukkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) tidak berpengaruh terhadap Penyerapan Anggaran, Kelancaran Pengadaan Barang/Jasa Berpengaruh terhadap Penyerapan Anggaran, Penyerapan Anggaran berpengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat, dan Penyerapan Anggaran berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Kata Kunci: Penyerapan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia, Pengadaan
Barang dan Jasa, Kesejahteraan Masyarakat, Pertumbuhan Ekonomi.



PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

quality of the HR (Human Resources) factor and the smooth procurement of goods and services. To measure the variable quality of human resources, an indicator is used, namely the percentage of civil servants with a minimum bachelor degree (S1) qualification, while to measure the smoothness of the procurement of goods and services, an indicator is used as the percentage of the number of tenders that can be completed. Furthermore, due to the problem of delays in budget absorption, this will affect people's welfare and economic growth. The indicator used to measure people's welfare variables is the Human Development Index (IPM), while the indicator used to measure economic growth is the Gross Regional Domestic Product (GRDP). The population used in this study is the total population of all local governments at the district or city level in Indonesia in 2021. The results of this study indicate that the Quality of Human Resources (HR) has no effect on Budget Absorption, Smooth Procurement of Goods and Services Affects Budget Absorption; Budget Absorption affects People's Welfare; and Budget Absorption affects Economic Growth.

Keywords: *Budget Absorption, Quality of Human Resources, Procurement of Goods and Services, Public Welfare, Economic Growth.*

PENDAHULUAN

Pembangunan suatu negara tidak terlepas dari urusan pemerintahan, dan pemerintahan tidak terlepas dari urusan keuangannya. Keuangan negara yaitu semua hak serta kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, dan secara hukum dapat dijadikan milik pemerintah. Daerah tentunya memerlukan pengadaan sumber keuangan melalui APBD untuk melaksanakan berbagai kegiatan terkait dengan proses otonomi daerah. Dalam perkembangannya terdapat fenomena yang menarik terkait dengan realisasi APBD, yaitu rendahnya tingkat daya serap anggaran (Masitoh, 2022). Menteri keuangan Sri Mulyani menyampaikan kekecewaannya karena tingkat serapan anggaran yang dialokasikan di APBD masih sangat rendah (Julita, 2020). Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga menyampaikan pada tahun 2021 terjadi rendahnya realisasi belanja daerah atau realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang hingga akhirnya dana mengendap di Bank Umum (Mashabi, 2021).

Selain itu, dikutip dari website resmi KPPOD (Komite Pelaksanaan Pemantauan Otonomi Daerah) bahwa realisasi belanja APBD provinsi dan kabupaten/kota per 31 Desember 2021 sebesar 85,15 persen. Jumlah tersebut tidak jauh dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 82,69 persen. Padahal, beberapa kali Kemendagri

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

mengingatkan pemda agar mempercepat serapan anggaran. Tidak hanya itu, ternyata selalu terjadi dana APBD yang tidak mampu diserap oleh Pemda. Pada tahun 2019 sebesar Rp234 triliun, tahun 2020 sebesar Rp274 triliun, dan Tahun 2021 sebesar Rp203 triliun (Hermiyetti, 2022). Untuk tahun anggaran 2022 juga dikhawatirkan terjadinya serapan anggaran pemerintah daerah yang terlambat yang dapat menyebabkan pelayanan publik tidak maksimal. Hal tersebut disebabkan karena pada pekan ketiga Januari 2022 masih terdapat lebih dari 100 rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD 2022 yang belum disahkan karena faktor keterlambatan dari pemerintah daerah (Sulistyo, 2022).

Ulandari, Akram, & Santoso (2021) menyatakan ada beberapa *factor* yang berimbas pada daya serap anggaran, di antaranya meliputi perencanaan, sumber daya manusia, PBJ, serta dimoderasi oleh adanya faktor administrasi. Sedangkan menurut Andri, Harun, & Dompok (2019) faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran adalah faktor administrasi, faktor waktu, faktor perencanaan kegiatan yang tidak matang, faktor dalam memahami peraturan (regulasi), faktor lelang atau tender, faktor lambatnya pengesahan APBD, faktor perpindahan pejabat/pegawai (mutasi), dan faktor pekan olahraga nasional (PON).

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pemerintah daerah membutuhkan strategi, modal berupa keuangan (*financial capital*), dan sumberdaya manusia (*human capital*) yang bisa diandalkan, apalagi terkait dengan SDM pengelolaan keuangan. Karena akan percuma saja ketika *financial capital*nya tinggi namun tidak diikuti dengan kualitas *human capital* yang profesional. *Human capital* bisa menjadi strategi dalam mengelola keuangan yang diharapkan akan memberi efek yang positif terhadap daya serap anggaran yang kemudian akan bermuara pada kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Untuk melaksanakan strategi terkait *human capital* tersebut, Rahman (2018) menitikberatkan pada penggunaan aspek kesehatan serta aspek pendidikan.

Selain berimbas pada kesejahteraan masyarakat, penyerapan anggaran yang kurang optimal ini juga dapat berimbas pada pertumbuhan ekonomi (Juliani & Sholihin, 2014). Sinaga (2016) menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur yang menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi sempat mengalami keterhambatan yang disebabkan oleh lambatnya pencairan dana. Apabila serapan anggaran melambat, maka akan berimbas pada perlambatan tumbuhnya ekonomi serta berakibat pada ruginya ekonomi yang menyangkut keuangan negara (Delia, Djaddang, Suratno, & Mulyadi, 2021). Penyerapan anggaran perlu untuk

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

diperhatikan secara lebih baik lagi, karena penyerapan anggaran tersebut memiliki pengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi.

TINJAUAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

- 1. Goal Setting Theory (Teori Penetapan Tujuan).** Teori penetapan tujuan pertama kali dikemukakan oleh Locke (1968) yang menekankan pada adanya keterkaitan antara tujuan dan kinerja seseorang terhadap tugas. Dalam teori tersebut ditemukan bahwa tujuan spesifik dan sulit menyebabkan kinerja tugas menjadi lebih baik daripada tujuan yang mudah. Selain itu disimpulkan bahwa setiap teori motivasi tugas yang memadai harus memperhitungkan tujuan dan niat sadar dari individu. Artinya pemikiran dan niat tersebut merupakan faktor penggerak dari perilaku.
- 2. Stakeholder Theory.** Pada dasarnya, teori ini menganut paham bahwa suatu perusahaan pada hakikatnya tidak dapat beroperasi hanya untuk memenuhi kepentingannya sendiri saja, melainkan ia juga harus memperhatikan/memenuhi kebutuhan dari *stakholdernya*/pemangku kepentingan (Handoko, 2021). Ketika dikaitkan dengan penelitian ini mengenai sektor publik, yang memegang peran sebagai *stakholder* adalah masyarakat. Tanpa partisipasi dari seluruh masyarakat kebijakan yang bagus sekalipun akan terasa kurang berdampak pada perubahan positif yang merupakan dampak (*outcome*) dari sebuah kebijakan yang dihasilkan (Wanto, 2017).
- 3. Institutional Theory (Teori Kelembagaan).** Teori institusional adalah penjelasan populer dan kuat mengenai keterkaitan antara tindakan individu dan organisasi. Fogarty & Rogers (2005) menerangkan bahwasanya teori tersebut menjadikan organisasi sebagai fokus perhatiannya. Teori ini awalnya menjelaskan bagaimana struktur makna yang dilembagakan mempengaruhi proses dalam organisasi (Greenwood & Suddaby, 2006). Organisasi yakni suatu keadaan sosial yang pastinya *include* dengan masalah didalamnya misalnya kriminalitas, kekuasaan, budaya, teknologi, strategi *etc* (Juliani & Sholihin, 2014).
- 4. Teori New Public Service (NPS).** Pelayanan publik yang berkualitas dari negara (birokrasi) adalah hak yang harus didapatkan oleh setiap warga negara. Warga negara juga berhak untuk mendapatkan perlindungan terhadap hak-haknya, didengar suaranya, sekaligus dihargai nilai dan preferensinya. Selain itu, warga negara juga berhak untuk

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

menolak, menilai, dan menuntut siapapun yang secara politis bertanggung jawab atas penyediaan pelayanan publik (Tamami, 2020).

5. **Agency Theory.** Teori tersebut (Jensen & Meckling, 1976) memberi batasan antar hak dengan kewajiban dengan jelas bagi pemilik (*principal*) serta pengelola organisasi (*agen*) berlandaskan ketidakyakinan. Terdapat pendelegasian beberapa wewenang terkait dengan pengambilan keputusan dari *principal* kepada agen. Hal tersebut juga bisa dipraktikkan untuk *sector public*. Pemerintah pusat dipandang sebagai *principal* dan pemerintah daerah sebagai *agent*.

6. Hipotesis

H1: Kualitas Sumber daya manusia (SDM) berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran.

H2: Kelancaran proses pengadaan barang dan jasa berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran.

H3: Tingkat Penyerapan Anggaran berpengaruh positif terhadap Kesejahteraan Masyarakat Suatu Daerah

H4: Tingkat Penyerapan Anggaran berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah

METODE PENELITIAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi APBD tingkat Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2021. Data yang didapatkan peneliti melalui sumber yang sudah ada, maka prosedur pengumpulan data dilakukan dengan cara diakses melalui situs resmi DJPK (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan), BPS (Badan Pusat Statistik), dan LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik). Penjelasan terperinci mengenai variabel-variabel yang digunakan untuk mengetahui ukuran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kualitas SDM

SDM merupakan salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan. Pada hakikatnya, SDM berupa manusia

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi itu (Suharto, 2021). Berikut rumus kualitas SDM yang diproksikan dengan persentase PNS dengan kualifikasi minimal strata satu (S1):

$$\text{Kualitas SDM} = \frac{\text{Jumlah PNS minimal S1}}{\text{Jumlah total PNS}} \times 100\%$$

Sumber: (Nadir, 2016)

2. Kelancaran Pengadaan Barang dan Jasa

Secara umum pengadaan barang/jasa merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa. Penyaluran serta distribusi *budget* untuk belanja tersebut salah satunya melalui PBJ pemda (Aflah, Junaidi, Arifin, & Sukarna, 2021).

Indikator untuk mengukur kelancaran pengadaan barang/jasa yaitu:

$$\text{Kelancaran Pengadaan Barang/Jasa} = \frac{\text{Jumlah tender telah selesai}}{\text{Jumlah seluruh tender}} \times 100\%$$

3. Penyerapan Anggaran

Tingkat penyerapan anggaran yaitu suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target rencana yang telah dicapai oleh instansi (Harahap, Taufik, & Nurazlina, 2020). Munawaroh (2019), Andri, Harun, & Dompok, (2019) menggunakan indikator untuk mengukur tingkat serapan anggaran belanja daerah sebagai berikut:

$$P = \frac{RA}{PA} \times 100\%$$

Keterangan:

P : Penyerapan Anggaran

RA : Realisasi Anggaran

PA : Pagu Anggaran

Sumber: Lampiran I PMK RI Nomor 249/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

4. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan suatu keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat. Menurut Ndakularak, Setiawina, & Djayastra (2014) cerminan dari daerah yang tergolong maju dapat dilihat melalui kesejahteraan rakyatnya serta diproksikan oleh capaian IPM yang tinggi. Tingginya IPM menunjukkan cukupnya pemerataan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

pembangunan antar wilayah maupun antar kelompok masyarakat dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat (Statistik 2018). Pada penelitian Riyanti (2020), Susanti & Hidayat (2020), Digdowiseiso & Damayanti (2021) rumus untuk menghitung IPM atau HDI sebagai berikut:

$$HDI = \sqrt[3]{Ikesehatan \times Ipendidikan \times pengeluaran}$$

Sumber: Renggo (2019)

5. Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Sukirno (2012) dalam (Ardiansyah, 2017) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang yang diproduksi dalam masyarakat meningkat. Laju pertumbuhan PDRB diperoleh dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan dengan rumus:

$$PDRB = \frac{PDRBn - PDRBn-1}{PDRBn-1} \times 100 \%$$

Sumber: (Renggo, 2019)

Alat analisis yang dipergunakan terkait pengujian H₁ sampai dengan H₄ menggunakan analisis *structural model* atau biasanya disebut *inner model*. Selanjutnya data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini diuji memakai *software smart PLS*. Dalam penelitian ini α ditetapkan sebesar 5%. Model penelitian dinyatakan dalam persamaan berikut:



Gambar 2. 2 Model Penelitian

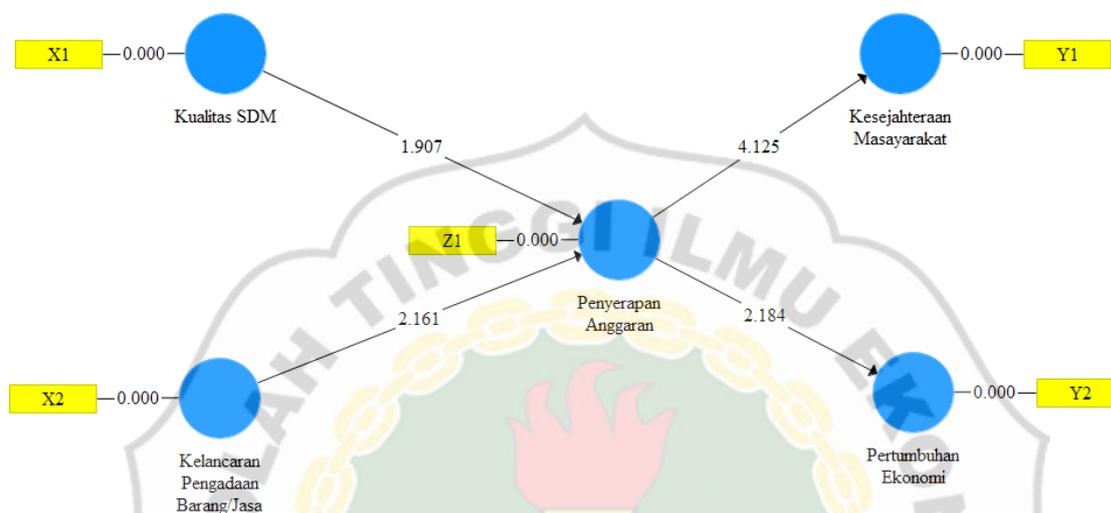
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Pengujian Model Struktural (Inner Model)

1. Analisis Koefisien Jalur (Path Coefficient)

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Model struktural di PLS dievaluasi yakni memakai *adjusted R-Square* pada variable dependen serta koefisien path guna variabel independen, selanjutnya dinilai signifikansinya atas dasar *t-statistic* tiap path. Output yang dihasilkan pada pengujian PLS *algorithm* disajikan pada gambar:



Gambar 4. 8 Tampilan Output Kalkulasi PLS Algorithm

Selain melalui diagram path pada PLS Algorithm, untuk lebih jelasnya dapat pula diamati melalui hasil output PLS Bootstrapping pada *path coefficient*:

Tabel 4. 7 Hasil Analisis PLS Bootstrapping

Path Coefficients

	Original Sa...	Sample Me...	Standard D...	T Statistics (...)	P Values
Kelancaran Pengadaan Barang/Jasa -> Penyerapan Anggaran	0.085	0.084	0.039	2.161	0.031
Kualitas SDM -> Penyerapan Anggaran	0.093	0.092	0.049	1.907	0.057
Penyerapan Anggaran -> Kesejahteraan Masyarakat	-0.210	-0.212	0.051	4.125	0.000
Penyerapan Anggaran -> Pertumbuhan Ekonomi	0.134	0.135	0.061	2.184	0.029

Melalui gambar di atas, dapat dilihat bahwa nilai P value dari pengaruh kualitas SDM terhadap penyerapan anggaran belanja daerah sebesar 0,057 lebih dari $\alpha = 0,05$ menunjukkan kualitas SDM tidak berpengaruh terhadap daya serap anggaran. Dengan demikian, hipotesis 1 (H1) tidak didukung. Selain melalui P value dapat pula dilihat melalui nilai T statistic sebesar 1,907 yang artinya lebih kecil dari 2 sehingga kualitas SDM tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran belanja daerah kabupaten/kota di Indonesia.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Selanjutnya dilihat dari sisi pengaruh kelancaran pengadaan barang/jasa terhadap penyerapan anggaran menunjukkan nilai P value sebesar 0,031 lebih kecil dari nilai $\alpha = 0,05$. Dengan demikian terdapat pengaruh antara kelancaran pengadaan barang/jasa (PBJ) terhadap daya serap anggaran. Selain itu, dapat pula dilihat melalui nilai T statistic sebesar 2,161 menunjukkan nilai yang lebih besar dari 2 yang artinya hipotesis 2 (H2) terdukung.

Hipotesis berikutnya terkait dengan pengaruh penyerapan anggaran terhadap kesejahteraan masyarakat dapat diperoleh hasil dengan melihat nilai P value sebesar 0,000 yang artinya nilai tersebut di bawah 0,05. Oleh karena itu, hipotesis 3 (H3) didukung. Nilai T statistic juga menunjukkan 4,125 lebih besar dari 2, artinya terdapat pengaruh daya serap anggaran terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Indonesia.

Terakhir mengenai pengaruh serapan anggaran terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dibuktikan melalui nilai P value yang menunjukkan angka 0,029 lebih kecil dari nilai alpha 0,05. Dengan demikian hipotesis 4 (H4) terdukung. Selain itu dapat pula dibuktikan melalui nilai T statistic dengan angka 2,184 yang berarti bahwa lebih besar dari 2. Hal tersebut menunjukkan adanya pengaruh daya serap anggaran terhadap pertumbuhan ekonomi pada tingkat kabupaten/kota di Indonesia.

2. Effect Size (f^2)

Perhitungan *effect size* (f^2) dipakai sebagai pengukuran kontribusi antar tiap variabel kepada bentukan R^2 yakni melihat nilai f^2 mencakup 0.02 kecil, 0.15 moderat, serta 0.35 artinya model besar (Ghozali, 2008). Berikut hasil uji f^2 :

Tabel 4. 8 Hasil Analisis PLS Algorithm

f Square

	Kelancara...	Kesejahteraan Masyarakat	Kualitas SDM	Penyerapan Anggaran	Pertumbuhan Ekonomi
Kelancaran Pengadaan Bar...				0.007	
Kesejahteraan Masyarakat					
Kualitas SDM				0.009	
Penyerapan Anggaran		0.046			0.018
Pertumbuhan Ekonomi					

Berdasarkan hasil perhitungan *effect size* dalam PLS menunjukkan angka 0,007; 0,009; 0,018; dan 0,046. Artinya memberi pengaruh yang minim ataupun lemah kepada hubungannya antara variabel independen kepada variabel dependen di penelitian ini.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

3. Pengujian Prediction Relevance (Q²)

Predictive relevance (Q²) digunakan untuk menguji kemampuan model untuk memprediksi dengan melihat hasil PLS Blindfolding. Hasil Q² > 0 menunjukkan model memiliki *predictive relevance*. Berikut hasil output PLS Blindfolding:

Tabel 4. 9 Hasil Analisis PLS Blindfolding

Construct Crossvalidated Redundancy

Total	Case1	Case2	Case3	Case4	Case5	Case6	Case7
				SSO	SSE	Q ² (=1-SSE...	
Kelancaran Pengadaan Barang/Jasa				460.000	460.000		
Kesejahteraan Masyarakat				460.000	441.267	0.041	
Kualitas SDM				460.000	460.000		
Penyerapan Anggaran				460.000	456.289	0.008	
Pertumbuhan Ekonomi				460.000	452.696	0.016	

Nilai Predictive Relevance (Stone-Geisser's Q²) yaitu 0,041; 0,008; dan 0,016 lebih besar dari 0 menunjukkan model struktural yang dihasilkan memiliki kemampuan untuk menguji pengaruh seluruh variabel yang ada. Selain itu, untuk melihat layak atau tidaknya model dan data untuk menguji pengaruh variabel, dapat pula digunakan nilai SRMR yang harus menunjukkan < 0,10 serta dapat dilihat pada hasil PLS Algorithm. Berikut hasil output PLS Algorithm pada model fit:

Tabel 4. 10 Hasil Analisis PLS Algorithm

Model_Fit

Fit Summary	rms Theta	
	Saturated M...	Estimated ...
SRMR	0.000	0.077
d_ULS	0.000	0.089
d_G	0.000	0.019
Chi-Square		45.547
NFI	1.000	0.459

Nilai SRMR = 0,000 kurang dari 0,10 artinya model yang dihasilkan telah layak untuk menguji seluruh pengaruh variabel yang ada.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Melalui hasil analisis data, ditunjukkan bahwa Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) tidak berpengaruh terhadap Penyerapan Anggaran. Berdasarkan karakteristik sampel, ternyata dapat diketahui bahwa masih terdapat beberapa PNS pada tingkat kabupaten/kota yang merupakan lulusan SD sampai Diploma IV pada total sampel. Selain itu juga walaupun SDM memegang peranan penting dalam mencapai suatu tujuan (serapan anggaran), namun jika dikaitkan dengan sektor publik segala sesuatu itu sudah jelas ada kaidah aturan yang harus diikuti *step by step*nya. SDM hanya menjalankan segala proses berdasarkan aturan yang ada. Selebihnya tetap mengikuti prosedur pencairan anggaran yang berlaku.

Selanjutnya hasil penelitian ini membuktikan bahwa terdapat pengaruh antara kelancaran pengadaan barang/jasa terhadap daya serap anggaran. Hasil tersebut menunjukkan ketika semakin lancar urusan PBJ sehingga semakin optimum pula daya serap anggaran pemerintah daerah kabupaten/kota. Artinya bahwa persentasi atau banyaknya tender yang berhasil diselesaikan oleh pemda dapat membantu memenuhi tercapainya tujuan berupa daya serap anggaran.

Hasil pengujian ini juga menunjukkan bahwa Penyerapan Anggaran berpengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Mengingat bahwa dalam UUD 1945 juga telah diamanatkan untuk memajukan kesejahteraan umum, maka penyerapan anggaran ini sangat penting dikarenakan salah satu bentuk dalam mensejahterakan bangsa ialah dengan cara mengelola keuangan negara yang diperuntukan untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Selain itu penelitian ini juga menghasilkan Penyerapan Anggaran berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Pemerintah selalu berupaya dalam memenuhi kebutuhan stakeholdernya yaitu masyarakat. Dalam hal ini pemerintah mengalokasikan anggaran belanja daerah untuk diserap secara optimal untuk sebesar-besarnya pertumbuhan ekonomi

Saran

Merujuk pada hasil ulasan maupun simpulan penelitian ini, peneliti memverifikasi masukan sebagai berikut:

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

1. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan kurun waktu yang paling *up to date* dengan rentang lebih lama supaya didapatkan penelitian dengan cakupan tervalid sehingga dapat lebih digeneralisasi, lengkap, akurat, dan terpercaya.
2. Tidak menutup kemungkinan masih terdapat berbagai variabel lain yang mampu mempengaruhi daya serap anggaran namun belum diteliti dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penambahan variabel yang sangat bervariasi tentunya diperlukan agar pengamatan paling representatif bisa didapatkan serta demi mengetahui faktor lain apa saja sebagai penyebab terjadinya serapan anggaran yang rendah.
3. Mengingat penelitian ini hanya menggunakan satu proksi untuk mengukur masing-masing variabel, mungkin ketika ditambahkan beberapa indikator lain dalam pengukuran suatu variabel dapat memperoleh hasil yang lebih mewakili setiap variabel tersebut.
4. Mengingat penelitian ini juga hanya menggunakan daya serap anggaran secara keseluruhan yaitu dari sisi Belanja Daerah. Mungkin akan lebih mewakili keadaan sesungguhnya ketika daya serap anggaran dipecah dari berbagai komponen belanja langsung maupun tidak langsung.
5. Melalui penelitian ini dapat diketahui bahwa ternyata setiap daerah masih dapat dikatakan canggung dalam hal menyerap anggaran yang dibuktikan melalui terdapat berbagai daerah yang memiliki serapan anggaran yang rendah. Maka dari itu, pemerintah diharapkan dapat melakukan perkembangan serta memaksimalkan perencanaan anggaran dan melakukan peningkatan kompetensi aparatur dalam rangka pengelolaan anggaran seperti memberikan pelatihan dengan mengacu kepada standar, karakteristik dan prinsip-prinsip anggaran sektor publik. Selain itu, Menumbuhkan rasa komitmen bagi pengelola anggaran dengan senantiasa melibatkan seluruh komponen unit/manajemen dalam proses perencanaan anggaran agar mampu menyesuaikan antara tujuan-tujuan otoritas pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adil. (2021, Juni 2). *Kemendagri Minta Pemda Kebut Penyerapan APBD 2021*. Dipetik Mei 8, 2022, dari Jpnn.com: <https://www.jpnn.com/news/kemendagri-minta-pemda-kebut-penyerapan-apbd-2021>

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- Alfayuni, F., & Dahtiah, N. (2021, Agustus). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penumpukan Penyerapan Anggaran dan Belanja Modal (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Cirebon). *Prosiding The 12th Industrial Research Workshop and National Seminar Bandung*, 1121-1127.
- Alimuddin. (2018). Analisis Penyerapan Anggaran Di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Dan Kopertis Makassar: Tesis. Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Badan Pusat Statistik*. (2022, Maret 31). Diambil kembali dari <https://www.bps.go.id/>
- Bastian, I., & Soepriyanto, G. (2003). *Sistem Akuntansi Sektor Publik* (Buku 1 ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Betham, A. A., Hipan, N., & Fality, F. (2019, Oktober). Analisis Yuridis Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Serta Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Pengadaan Barang/Jasa. *Jurnal Yustisiabel*, 3(2), 191-212.
- Chun, Y. H., & Rainey, H. G. (2005, February 25). Goal Ambiguity and Organizational Performance in U.S. Federal Agencies. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 15, 529-557.
- Dacin, M. T., Goodstein, J., & Scott, W. R. (2002, February). Institutional Theory and Institutional Change: Introduction to the Special Research Forum. *Academy of Management Journal*, 45(1), 45-57.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan*. (2019, September 25). Diambil kembali dari <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=5412>
- Engkun, T. A. (2018). Rancang Bangun Manajemen Karier PNS. *Jurnal Inspirasi*, 9(2), 47-62.
- Fahlevi, H., & Ananta, M. R. (2015). Analisis efisiensi dan efektifitas anggaran belanja langsung - Studi pada SKPD di. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*, 1(2), 37-44.
- Gagola, L. S., Sondakh, J. J., & Warongan, J. D. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "Goodwill"*, 8(1), 108-117.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- Hadyan, R. (2019, Oktober 16). *Indonesia Kekurangan SDM yang Kompeten untuk Kembangkan Ekspor Jasa*. Dipetik April 1, 2022, dari Ekonomi: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20191016/12/1159801/indonesia-kekurangan-sdm-yang-kompeten-untuk-kembangkan-ekspor-jasa>
- Ikhsan, M., & Sari, V. F. (2020, November). Pengaruh Pengetahuan Peraturan, Komitmen Manajemen, Dan Lingkungan Birokrasi Terhadap Penyerapan Anggaran Terkait Pengadaan Barang/Jasa (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Padang). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(4), 3705-3719.
- Iqbal, M. (2020). Pengaruh Pelaksanaan E-Katalog Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Terhadap UMKM. *Jurnal USM Law Review*, 3(1), 77-97.
- Jatmiko, B. (2020, September). Pengaruh Pengawasan Internal, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 7(2), 231-246.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia*. (2021, Agustus 25). Diambil kembali dari Pandemi Covid-19 Mempengaruhi Kinerja APBN 2020: <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/pandemi-covid-19-mempengaruhi-kinerja-apbn-2020/>
- Layanan Pengadaan Secara Elektronik*. (t.thn.). Dipetik Maret 31, 2022, dari <https://lpse.lkpp.go.id/eproc4/lelang?kategoriId=&tahun=2021&instansiId=&rekanan>
=
- Mahardhika, V. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pembuat Komitmen Sebagai Upaya Pencegahan Korupsi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 16(1), 140-155.
- Nadhor, R. A., & Wijayanti, R. (2020). Pengaruh dana perimbangan dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap belanja daerah pemerintah (studi kasus pada 34 provinsi di indonesia periode 2017-2018). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 8(2), 1-38.
- Oktriawan, W., Adriansah, & Alisa, S. (2022, Januari). Kesejahteraan Masyarakat di Desa Campakasari Kecamatan Campaka. *Muttaqien*, 3(1), 01-14.
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS . (t.thn.).

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020. (t.thn.). *Tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi corona virus disease 2019 (covid- 19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2000 Tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil. (t.thn.).

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. (t.thn.). Dipetik April 1, 2022, dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/161828/perpres-no-12-tahun-2021>

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (t.thn.). Dipetik April 1, 2022, dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/73586/perpres-no-16-tahun-2018>

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021. (t.thn.). *Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.*

PMK No. 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. (t.thn.).

Powell, W. W., & DiMaggio, P. (1991). *The New Institutionalism in Organizational Analysis*. Chicago: University of Chicago Press.

Rahman, A. (2018). Identifikasi Strategi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Sungaiambawang Kabupaten Kuburaya Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Manajemen Pembangunan*, 5(1), 17-36.

Safitri, S. (2016, Februari). Sejarah Perkembangan Otonomi Daerah di Indonesia. *Jurnal Criksetra*, 5(9), 79-83.

Tamami, A. I. (2020). Kualitas Pelayanan Di Sektor Publik Dengan Perspektif NPS. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 6(1), 1-12.

Ulandari, V., Akram, & Santoso, B. (2021, Juli). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dengan Administrasi Sebagai Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(6), 1577-1591.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. (t.thn.).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. (t.thn.).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. (t.thn.).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (t.thn.).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). (t.thn.).

Verawaty, Jaya, A. K., Puspanita, I., & Nurhidayah. (2020, April). Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. *Management, Business, and Accounting*, 19(1), 21-37.

Vinandha, V. (2021, Maret 4). *Alasan Mengapa Keuangan Negara Perlu Dikelola dengan Baik*. Dipetik Maret 23, 2022, dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-singawang/baca-artikel/13737/Alasan-Mengapa-Keuangan-Negara-Perlu-Dikelola-dengan-Baik.html>

Wanto, A. H. (2017). Strategi pemerintah Kota Malang dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis konsep smart city. *Journal of Public Sector Innovations (JPSI)*, 2(1), 39-43.

Yasin, M. (2020, Juni). Analisis Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten/Kota Jawa Timur. *Journal of Economic, Business and Accounting*, 3(2), 465-472.

Zaenudinsyah, F. (2016). Analisis Faktor Penyebab Penumpukan Pencairan Dana APBN pada Akhir Tahun Anggaran. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan Kebijakan Publik*, 1(1), 67-83.